KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Vol. XXVIII No. 2, 2019: 140 - 148

PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

Ika Ristiyani Madyaningrum
Magister Kajian Pariwisata, Sekolah Pascasarjana
Universitas Gadjah Mada
Email: ikaristi@gmail.com

Aloisius Chris Cahyo Utomo
Magister Kajian Pariwisata, Sekolah Pascasarjana
Universitas Gadjah Mada
Email: aloisius.chris@gmail.com

Yudha Wahyu Pratama
Magister Kajian Pariwisata, Sekolah Pascasarjana
Universitas Gadjah Mada
Email: yudhawpratama@gmail.com

Abstract

This article specifically discusses the participation of local communities in tourism development in Karimunjawa National Park, which is administratively a part of Jepara Regency, Central Java Province. This research uses a qualitative approach, the research findings show that the participation of local communities in Karimunjawa is realized through the formation of the Tourism Local Transportation Association, the Lodging Association, the Tourism Ship Association, the Culinary Association, and the Tour Guides Association which are members of the Indonesian Tour Guides Association. also encouraged to offer local Karimunjawa superior products in the form of food, beverages, and handicraft products to tourists visiting Karimunjawa to support the economic development and empowerment of the Karimunjawa community.

Keyword: Karimunjawa, Participation, Tourism

PENDAHULUAN

Taman Nasional Karimunjawa merupakan sebuah kawasan kepulauan yang terletak di Laut Jawa, berjarak 77.2 km dari Kota Jepara. Secara administratif Karimunjawa termasuk dalam Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Taman Nasional Karimunjawa mempunyai kekayaan alam dengan potensi bahari seluas ± 110.000 hektare dan potensi daratan seluas ±1.500 hektare. Karimunjawa terdiri

atas 27 pulau, hanya 5 pulau saja yang berpenghuni: Karimunjawa, Kemojan, Nyamuk, Parang, dan Genting[1]. Karimunjawa juga merupakan salah satu dari tujuh taman nasional laut yang ada di Indonesia[2].

Sektor pariwisata saat ini menjadi sektor unggulan dalam penunjang ekonomi masyarakat Karimunjawa. Pariwisata di Karimunjawa masih mengandalkan kekayaan alam kepulauannya: ekosistem bawah air, bentang alam, serta produk-produk masyarakat lokal yang juga mengandalkan kekayaan alam Karimunjawa.

Wisata bahari di Karimunjawa telah berkembang pesat selama satu dekade terakhir. Pengembangan wisata bahari memiliki arti strategis dalam pengembangan budaya bahari, sebagai usaha multi sektor, ekonomi daerah dan penguatan peran serta masyarakat (Baiquni, 2004).

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji keterlibatan masyarakat lokal dalam perkembangan wisata bahari di Karimunjawa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Nilai lebih dari pendekatan ini adalah bisa mendapatkan perspektif alami dari suatu fenomena dalam kehidupan masyarakat dan membuka peluang mendapatkan pendalaman lebih terperinci dari pandangan-pandangan individu masyarakat tersebut (Lewis, 2003). Dengan pendekatan kualitatif diharapkan bahwa penelitian akan mengungkap fenomena yang terjadi, dan digali secara mendalam melalui pandangan dan pengalaman hidup masyarakat lokal Karimunjawa.

PEMBAHASAN

Wisata Bahari di Taman Nasional Karimunjawa

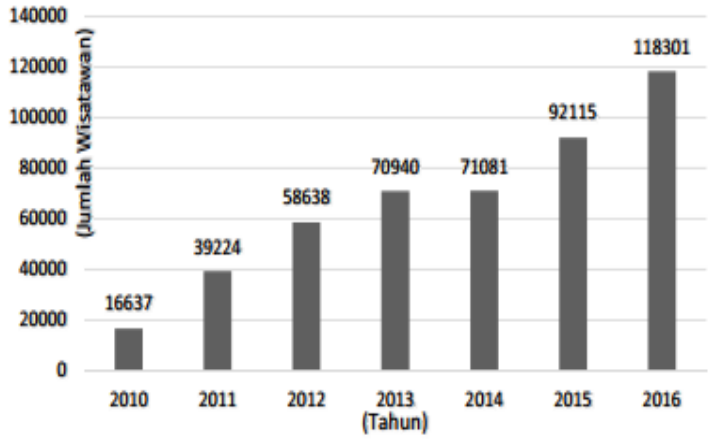
Wisata bahari didefinisikan sebagai perjalanan wisata minat khusus dengan tujuan melakukan kegiatan di area ekosistem pantai dan laut. Fandeli (1995) menyatakan bahwa wisata bahari adalah kawasan wisata yang obyek dan daya tarik wisatanya bersumber pada *seascape* dan *coastal seascape*. Konsep wisata pesisir dan bahari didasarkan pada *view*, keunikan alam, karakteristik ekosistem, kekhasan seni budaya dan karakteristik masyarakat (Garrod dan Wilson, dalam Tafalas, 2010).

[1] http://jeparakab.go.id, diakses 27 Desember 2017.

[2] Taman Nasional Laut Indonesia lainnya adalah: Taman Nasional Bunaken,Taman Nasional Kepulauan Seribu, Taman Nasional Kepulauan Togean, Taman Nasional Taka Bonerate, Taman Nasional Cendrawasih, Taman Nasional Wakatobi. Sumber: Wisata Menyelam di 7 Taman Nasional Laut, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sebagai kawasan yang menggunakan wisata bahari sebagai model pengembangan, Taman Nasional Karimunjawa sudah cukup maju. Sejumlah kegiatan wisata bahari yang dapat dilakukan di Taman Nasional Karimunjawa antara lain *snorkeling*, selam *SCUBA, island hopping*, jelajah mangrove, berkemah di pinggir pantai dan lain sebagainya. Selain daya tarik yang berbasis aktivitas, Karimunjawa juga menawarkan daya tarik berbasis budaya seperti wisata kuliner di alun-alun, Makam Sunan Nyamplung sebagai obyek wisata religi yang selalu ramai dikunjungi, bengkel pembuatan perahu di Pantai Cemara Batulawang dan lain sebagainya.

Seiring berjalannya waktu, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional Karimunjawa mengalami peningkatan signifikan. Tahun 2010 jumlah kunjungan wisatawan sebesar 16.637 sedangkan tahun 2016 mencapai 118.301 kunjungan. Wisatawan yang berkunjung didominasi oleh wisatawan domestik. Tahun 2016, kunjungan wisatawan domestik mencapai 110.984 dan wisatawan mancanegara mencapai 7.317[3].Kunjungan ke Taman Nasional Karimunjawa biasanya mengalami puncak saat libur akhir pekan. Wisatawan berangkat dari Pelabuhan Jepara jumat sore, tiba di Pelabuhan Karimunjawa malam hari kemudian menikmati daya tarik wisata pada hari sabtu dan pulang minggu pagi atau siang.



Sumber: Statistik Kunjungan Wisatawan 2010-2016

Gambar 1. Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke Taman Nasional Karimunjawa

[3] Laporan Kunjungan statistik wisatawan 2016 diambil dari TICjepara.org pada tanggal 21 Februari 2017 pukul 09.50 wib.

Peningkatan jumlah wisatawan diimbangi pula dengan peningkatan jumlah penyedia jasa wisata. Penyedia jasa wisata di Taman Nasional Karimunjawa terbagi menjadi dua jenis berdasarkan kepemilikannya yaitu investor dari luar Kepulauan Karimunjawa dan masyarakat setempat.

Hubungan Masyarakat Karimunjawa dengan Balai Taman Nasional

Selain sektor wisata bahari, wilayah Kepulauan Karimunjawa mempunyai sektor andalan lainnya yaitu sektor perikanan. Tercatat sebanyak 2844 orang warga Karimunjawa menjadi nelayan dengan komposisi 778 orang juragan (*master*) dan 2066 pandega (*worker*)[4]. Jumlah tersebut menduduki peringkat ketiga di Kabupaten Jepara. Namun, keberadaan aktivitas perikanan di Kepulauan Karimunjawa sering berbenturan dengan kebijakan zonasi dari pihak Balai Taman Nasional. Dalam kebijakan zonasi saat ini, kawasan Taman Nasional Karimunjawa terbagi atas 9 zona. Zona – zona tersebut adalah: zona inti, zona perlindungan bahari, zona budidaya bahari, zona religi budaya dan sejarah, zona rehabilitasi, zona tradisional, zona pemanfaatan darat, dan zona pemanfaatan bahari[5]. Kebijakan zonasi ditetapkan tahun 2012 dan merupakan perkembangan kebijakan sejak ditetapkannya Karimunjawa menjadi Taman Nasional tahun 1999. Kawasan zonasi di Taman Nasional Karimunjawa banyak bersinggungan dengan kawasan *fishing ground* dari nelayan setempat. Hal tersebut yang membuat konflik antara nelayan dan pihak taman nasional.

Adanya zonasi dalam taman nasional dirasa membatasi ruang gerak masyarakat lokal dalam memanfaatkan sumberdaya kawasan sebagai sumber mata pencaharian terutama para nelayan. Namun, terbatasnya ruang gerak tersebut tidak menghalangi masyarakat untuk tetap mempunyai mata pencaharian yang layak. Seperti yang diungkapkan Subri (2005) bahwa dalam menghadapi perubahan lingkungan, manusia akan mengembangkan pola adaptasi yang berbentuk pola tingkah laku seperti perubahan strategi mata pencaharian. Tiga strategi mata pencaharian yang bisa dilakukan untuk memutus rantai persoalan nelayan menurut Satria (2009), yaitu 1) mengembangkan strategi nafkah ganda; 2) mendorong mencari ikan ke laut lepas; 3) mengembangkan diversifikasi alat tangkap. Para nelayan di Kepulauan Karimunjawa mengembangkan strategi nafkah ganda. Di samping bekerja sebagai nelayan, mereka juga bekerja di sektor wisata bahari sebagai pemilik homestay, pengrajin cinderamata, pengusaha kuliner, pemandu wisata, penyedia transportasi laut dan darat.

[4] BPS Kabupaten Jepara , 2017, Kabupaten Jepara dalam angka 2016, hal 129, diunduh dari jeparakab.bps.go.id pada tanggal 1 mei 2017 pukul 19.50
[5] Sumber: Balai Taman Nasional Karimunjawa

Dengan partisipasi masyarakat dalam aktivitas pariwisata, konflik masyarakat dengan pihak Balai Taman Nasional memiliki fenomena yang berbeda. Satu sisi pertentangan antara nelayan dan pihak Balai Taman Nasional kadang masih sering terjadi tapi disisi lain kerjasama juga terjadi. Koordinasi antar *stakeholder* terkait bersama masyarakat di Karimunjawa terjalin dalam hal pengusahaan fasilitas wisata bahari. Contoh kerjasama antara Balai Taman Nasional dengan masyarakat dalam hal ini pemandu wisata selam adalah pemasangan *mooring buoy* di beberapa titik wisata selam. *Mooring buoy* diupayakan agar pemilik kapal wisata tidak membuang jangkar saat berlabuh. Jangkar yang dibuang ke laut saat berlabuh berpotensi merusak terumbu karang sebagai salah satu atraksi wisata bahari.

Partisipasi Masyarakat

Dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No: KM.67/UM.001/MKP/2004, tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-pulau kecil, dijelaskan prinsip-prinsip pengembangan pariwisata yang salah satunya disinggung tentang prinsip partisipasi masyarakat. Dewi dkk. (2013) memaparkan partisipasi secara umum dapat dimaknai sebagai hak warga masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian. Partisipasi masyarakat lokal Karimunjawa diharapkan menumbuhkan tanggungjawab dan rasa memiliki yang akan menentukan keberhasilan dan keberlanjutan pengembangan pariwisata di Karimunjawa.

Partisipasi Masyarakat Karimunjawa dalam Perencanaan Pariwisata

Tolak ukur yang digunakan untuk menentukan adanya partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan adalah keterlibatan dalam identifikasi masalah, perumusan tujuan, dan pengambilan keputusan terkait pengembangan kepariwisataan (Dewi dkk, 2013). Dalam perencanaan pariwisata, peran masyarakat lokal sebagai salah satu *stakeholder* penting, umumnya tidak turut berpartisipasi secara aktif dalam inisiasi perencanaan pengembangan wisata di daerahnya, bahkan seringkali terabaikan (Damanik, 2014).

Inisiasi awal perencanaan pengembangan pariwisata kawasan Karimunjawa dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Bentuk inisiasi tersebut berupa pengadaan pelatihan-pelatihan yang meliputi pelatihan bahasa, pelatihan kepemanduan selam *scuba* dan *snorkeling*, dan sosialisasi program Sapta Pesona Kementerian Pariwisata[6]. Masyarakat hanya mengikuti dan menjalankan program-program pelatihan yang diadakan oleh Dinas

[6] Sumber: Wawancara dengan Bapak Arief, Lurah Karimunjawa

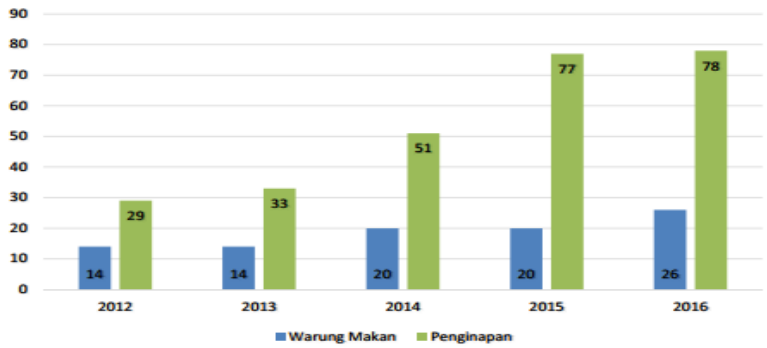
Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Dalam pelaksanaan beberapa pelatihan awal, masyarakat dibayar untuk datang dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Sebagian besar dari masyarakat lebih memilih untuk melaut daripada harus menghabiskan waktu mengikuti program pelatihan, terlebih meskipun dibayar, nilai yang diterima jauh lebih rendah dibandingkan yang dapat dihasilkan dengan melaut.

Seiring dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Karimunjawa dan peningkatan permintaan kebutuhan aktivitas wisata bahari (khususnya pemandu wisata bahari dan penginapan), kesadaran masyarakat lokal akan manfaat pengetahuan dari pelatihan – pelatihan tersebut berangsur-angsur membaik. Masyarakat lokal Karimunjawa mulai berpartisipasi secara aktif dalam pelatihan – pelatihan kepariwisataan yang diadakan baik dari pemerintah maupun dari beberapa LSM.

Partisipasi Masyarakat Karimunjawa dalam Pelaksanaan Pariwisata

Partisipasi masyarakat lokal Karimunjawa dalam pelaksanaan berupa pembentukan Paguyuban Transportasi Lokal Wisata, Paguyuban Penginapan, Paguyuban Kapal Wisata, Paguyuban Kuliner, dan Himpunan Pramuwisata Indonesia. Pembentukan paguyuban – paguyuban ini merupakan bentuk respon kolektif masyarakat lokal Karimunjawa dalam melihat peluang – peluang ekonomis kegiatan pariwisata di Karimunjawa.

Selain dalam bentuk paguyuban, masyarakat lokal Karimunjawa juga terdorong untuk menawarkan produk- produk unggulan lokal Karimunjawa dalam bentuk makanan, minuman, dan hasil kerajinan tangan. Kegiatan penawaran ini merupakan dampak dari kontak sosial masyarakat lokal dengan wisatawan, dimana masyarakat lokal menyesuaikan pola sosial terhadap perubahan ekonomi akibat kegiatan pariwisata dan menawarkan fasilitas dan produk lokal kepada wisatawan (Nurdin, 2016).



Sumber: Kecamatan Karimunjawa dalam Angka 2012-2016

Gambar 2. Peningkatan Jumlah Amenitas Milik Masyarakat di Kepulauan Karimunjawa

Gambar 2 menunjukkan bahwa masyarakat merespon aktivitas wisata yang ada di Kepulauan Karimunjawa dalam aspek amenitas cukup antusias. Selain amenitas, pariwisata juga menyerap 184 masyarakat lokal untuk menjadi pemandu wisata yang tergabung dalam Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI). Tujuh belas operator wisata yang beroperasi di Kepulauan Karimunjawa dikendalikan oleh masyarakat lokal. Untuk menikmati daya tarik di laut, wisatawan dibawa menggunakan kapal nelayan yang dimodifikasi menjadi kapal wisata. Setidaknya ada 60 kapal yang beroperasi untuk melayani wisatawan menikmati daya tarik wisata. Dengan tingginya permintaan ditambah respon masyarakat, beberapa *stakeholder* yang bergerak dalam bidang transportasi seperti PT Pelni, ASDP, dan Bahari Express lebih intens mengoperasikan saran transportasi bagi wisatawan menuju Kepulauan Karimunjawa. Dari beberapa hal tersebut, aktivitas pariwisata di Kepulauan Karimunjawa tidak hanya melibatkan dan memberikan keuntungan untuk masyarakat lokal saja tetapi semua stakeholder yang mempunyai sumberdaya untuk mengembangkan usaha wisata. Pola pengembangan wisata bahari di kawasan kepulauan seperti ini semestinya dapat menjadi model untuk pengembangan wilayah lainnya.

Partisipasi Masyarakat Karimunjawa Dalam Pengawasan dan Pelestarian Pariwisata

Pengawasan dan pelestarian merupakan salah satu aspek penting dalam keberlanjutan pariwisata. Konsep pariwisata yang berkelanjutan menekankan pada tiga aspek yaitu ekologi, sosial budaya dan perekonomian. Keterlibatan pemandu wisata dalam bekerjasama dengan Balai Taman Nasional terwujud melalui pengawasan dan pelestarian terumbu karang di area wisata. Kegiatan ini rutin dilaksanakan, bahkan terkadang melibatkan wisatawan untuk turut serta melestarikan karang. Pelatihan pemandu wisata selam yang ada, juga mengenalkan kompetensi pemandu wisata sebagai pelestari lingkungan kerjanya. Kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan pariwisata di daerahnya juga berjalan baik. Kebersihan wilayah terjaga, dibantu dengan adanya petugas kebersihan yang rutin berkeliling mengangkut sampah wisatawan.

Wisatawan menghormati kegiatan atau adat istiadat masyarakat yang sudah ada. Sebagai contoh, tidak ada wisatawan yang menggunakan pakaian sangat terbuka mengingat akar budaya Muslim cukup kuat di Karimunjawa.

Faktor kenyamanan dan keamanan pada suatu kawasan pariwisata merupakan nilai tambah dan perluang untuk dikunjungi oleh wisatawan. Faktor tersebut termasuk dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata bahari di Karimunjawa. Pemandu dan penyedia fasilitas pariwisata ada yang pernah mengikuti pelatihan kegawatdaruratan. Hal ini merupakan salah satu usaha

untuk menjaga keamanan dan keselamatan wisatawan. Dengan demikian wisatawan merasa nyaman dan akan kembali lagi ke Karimunjawa, sehingga keberlanjutan pariwisata tetap terjaga.

Terkait peningkatan kunjungan wisatawan, masyarakat perlu mengoptimalkan sumberdaya manusia agar dapat ikut serta dalam kegiatan pariwisata bahari di wilayahnya guna meningkatkan pendapatan. Hal ini tidak dapat dihindarkan karena kegiatan pariwisata tidak terlepas dari interaksi masyarakat sekitarnya. Peningkatan pendapatan masyarakat yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kepariwisataan merupakan salah satu dampak positif yang dirasakan. Pemuda aktif sebagai pemandu wisata, ada pula yang masih mencari ikan atau teripang di malam hari. Aktivitas ibu-ibu memasak makanan kecil untuk dibawa dan diperjualbelikan di pasar sebagai pelengkap kuliner lokal. Pemilik kapal wisata juga memperhatikan kebersihan kapalnya, merawat mesin kapal dengan baik agar wisatawan nyaman. Transportasi darat semakin menjamur sehingga harus diwadahi oleh sebuah paguyuban seperti halnya paguyuban pemilik kapal wisata agar tidak terjadi salah paham. Berbagai alternatif pekerjaan mendongkrak pendapatan masyarakat setempat dengan pesat. Perekonomian masyarakat Karimunjawa semakin meningkat seiring dengan perkembangan pariwisata disana.

PENUTUP

Pengelolaan sumber daya pariwisata di Karimunjawa tidak lepas dari campur tangan *stakeholder* terkait. Mengacu pada pendekatan tata kelola pemerintah yang bersih dan berkelanjutan pemerintah sebagai fasilitator memberikan peran dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata berbasis partisipasi masyarakat sudah terwujud. Masyarakat mulai menjadi subjek pembangunan pariwisata. Peningkatan perekonomian berjalan baik, pelestarian lingkungan di kawasan Balai Taman Nasional juga terlaksana. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan pariwisata dan berkoordinasi dengan *stakeholder* lain secara baik.

REFERENSI

Baiquni, M. 2004. *Pariwisata Bahari Sebagai Alternatif Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Wilayah*. Dalam Jurnal Pariwisata *STIEPAR*. Vol 5. No.2.

BPS Kabupaten Jepara. 2017. *Kecamatan Karimunjawa dalam angka 2012- 2016*. Diunduh dari jeparakab.bps.go.id pada tanggal 1 mei 2017 pukul 19.50.

Damanik, J. 2014. *Stakeholders' Partnership In Agrimarine-Based Tourism Development*

In Indonesia: Problems and Solutions. Dalam 9th International Academic Conference. Hal 265.

Dinas Pariwisata Kabupaten Jepara. *Laporan Kunjungan Statistik Wisatawan 2016*. Diunduh dari TICjepara.org pada tanggal 21 Februari 2017 pukul 09.50.

Dewi, M.H.U., Fandeli, C., Baiquini, M., 2013. *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali*. Dalam Jurnal Kawistara. Vol 3. No 2.

Fandeli, C. 1995. *Pengertian dan Kerangka Dasar Kepariwisataan dalam Dasar-dasar Kepariwisataan Alam.* Yogyakarta: Liberty.

Lewis, J. 2003. *Design Issues in Qualitative Research Practice: a Guide for Social Science Student Researcher* (eds.) Jane Ritchie and Janes Lewis. London: SAGE Publications.

Nurdin, 2016. *Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Pulau Samalona, Makassar*. Dalam Jurnal JUMPA. Vol 3. No 1. Hal 175-189.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No: KM.67/UM.001/MKP/2004 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau – Pulau Kecil.

Tafalas M. 2010. *Dampak pengembangan ekowisata terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat lokal.Studi kasus ekowisata bahari Pulau Mansuar Kabupaten Raja Ampat*. (Thesis). Bogor: Institut Pertanian Bogor. Diunduh dari www.repository.IPB.ac.id pada tanggal 9 Juni 2017 pukul 19.23.

Satria, A.2009. *Pesisir dan laut untuk rakyat*. Bogor: IPB Press.

Subri, M. 2005. *Ekonomi kelautan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.